

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Berikan Bansos Plus untuk Korban PHK

JAKARTA-Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencukupi kebutuhan makan dan hunian para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak wabah Corona. "Minimal, membantu mencukupi bahan pokok makanan dan tempat tinggal karena mereka masuk kategori rentan miskin," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, (3/4/2020).

Menurut Mujiyono, bantuan tersebut merupakan bukti bentuk kehadiran negara. Untuk bantuan tempat tinggal, Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta membuat surat edaran yang ditujukan bagi pemilik kos dan kontrakan. Yaitu untuk memberi toleransi penundaan pembayaran uang sewa, minimal untuk tiga bulan.

"Rata-rata yang punya kontrakan itu kan cukup mampu dan punya tabungan. Mereka bisa membantu orang-orang sesama warga negara, sesama warga DKI," tutur Mujiyono. Ia menyebut selain menunda pembayaran, para pemilik kos juga bisa memberikan diskon. "Tidak ada salahnya karena saat sekarang ini bisa menjadi amal," ucap politikus Partai Demokrat ini.

Untuk bantuan makanan, menurutnya pegawai korban PHK ini bisa mendapatkan bantuan sosial berupa sembako yang kini tengah dijalankan oleh Pemrov DKI Jakarta. Menurut dia, paket sembako yang diberikan bisa ditambah nilainya. "Ditambah barangnya. Jangan Rp149.000, tambah ada komponen daging, telur, buah dan lainnya karena kan saat ini juga menyambut



Minimal, membantu mencukupi bahan pokok makanan dan tempat tinggal karena kan mereka masuk kategori rentan miskin,"

Mujiyono
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta

Ramadan dan Idul Fitri," ucap dia.

Lebih lanjut, Mujiyono menyatakan Pemprov harus memperbaiki data bila korban PHK ingin diberikan bantuan. Salah satunya ialah kejelasan status, seperti korban PHK, pegawai yang dirumahkan dan tak digaji atau pegawai dirumahkan namun masih menerima gaji pokok.

Tak hanya itu, ia berharap bantuan bisa diberikan berdasarkan lokasi penerima. Ia beralasan tidak sedikit pekerja di Jakarta merupakan warga perantau yang tidak menetap di Jakarta.

"Semua harusnya dapat karena yang penting domisili. Bansos kan tidak mengikat warga mana, yang penting domisili," kata Mujiyono. Ia menilai bila ada warga dengan KTP Jakarta, tapi bekerja di daerah lain maka Pemprov setempat harus ikut membantu. "Termasuk mahasiswa perantau juga harus dibantu pemerintah setempat," ucapnya.

Jelang Lebaran
Fraksi PAN DKI Jakarta tidak mem-

permasalahkan pembagian bantuan sosial (bansos) pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta akan diberikan menjelang lebaran. Terlebih, saat ini sedang berjalan pembagian bansos dari pemerintah pusat.

"Seharusnya tidak masalah, bansos dari pemerintah pusat juga sedang jalan," ucap Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Minggu (3/4/2020).

Menurut Wakil Ketua DPRD tersebut, hal yang penting dilakukan adalah pendataan penerima bansos agar tepat sasaran. Data penerima harus disinkronkan dengan data penerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos). "Jadi, lebih tepat sasaran. Harusnya, (Gubernur DKI Jakarta) Pak Anies bikin pendataan tambahan, yang tidak dapat lewat Kemensos, bisa dicover sama Pemprov. Jadi, saling back-up. Yang jelas, kita awasi pelaksanaannya," ucap Zita.

Penentuan waktu pembagian sebelum lebaran dinilai tepat. Menurut Zita, waktu menjelang lebaran sering terjadi kenaikan harga kebutuhan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Berikan Bansos Plus untuk Korban PHK

pokok dan kelangkaan barang. "Itu adalah waktu yang krusial, makin dekat lebaran, stok bakal berpotensi habis, harga juga akan lebih berpotensi naik. Perluasan penerima bantuan artinya ini akan menjawab persoalan lebih banyak orang. Kebijakan ini memang ingin menjawab timing tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bantuan sosial (bansos) jelang Idul Fitri tahun ini. Bansos akan diberikan sekitar seminggu sebelum Lebaran.

"Dari DKI sendiri nanti akan memberikan bingkisan bantuan sosial menjelang Idul Fitri, yang nanti proses eksekusinya akan dilakukan sekitar seminggu dan sepuluh hari sebelum Lebaran," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Bansos akan menjangkau masyarakat lebih banyak dari pada yang pertama," ujar Anies.

Waktu Mepet

Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Iman Satria menilai pemerintah DKI tak akan bisa menyempurnakan data penerima bantuan sosial atau bansos. Menurut Iman, pendataan pemerintah DKI tak pernah siap 100 persen. Belum lagi waktunya mepet untuk mendata ulang penerima bansos di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Dari dulu sejak Pemprov lahir sampai sekarang yang namanya pen-

dataan kita enggak pernah siap, apalagi cuma diminta waktu 1-2 minggu. Satu hal yang mustahil," kata Iman.

Politikus Partai Gerindra ini mengutarakan, RT dan RW berperan untuk mendata daftar penerima bansos yang berhak. Dia berujar warga bakal berbondong-bondong mendaftarkan diri. Sebab, pemerintah DKI membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang belum memperoleh bantuan untuk mendaftar.

Sayangnya, Iman menilai, RT dan RW akan kesulitan memverifikasi data tersebut. "Kan tidak mungkin ada waktu untuk verifikasi. Mepet waktunya, sampai kapan mau menahan (bantuan) supaya angkanya 100 persen betul-betul murni, tidak mungkin," jelasnya.

Pendistribusian bansos oleh pemerintah DKI sejak 9 April kacau balau. Penerima bansos tidak tepat sasaran. Orang kaya hingga anggota DPRD DKI masuk dalam daftar penerima bansos. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, penerima bansos adalah warga miskin dan rentan miskin.

Alhasil, pemerintah DKI menunda penyaluran bansos tahap dua. Penundaan itu sampai perbaikan data selesai demi menghindari kesalahan penyaluran seperti fase pertama. Bahkan pemerintah kota Jakarta Timur telah menarik kembali 874 paket bansos karena dianggap salah sasaran.

Jangan Kecolongan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengin-

gatkan agar Dinas Tenaga Kerja DKI lebih intensif mengawasi perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sejak Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial diterbitkan pada 9 April 2020, pemerintah menerapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Namun, sejak regulasi itu diterbitkan masih banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap kebijakan tersebut.

"Pemerintah harus lebih ditajamkan pada penguasaan lapangan secara nyata bukan hanya sekedar merujuk pada normatif laporan belaka, jangan sampai kecolongan lagi" kata Gilbert, Sabtu (2/5/2020).

Sejak 20 hari setelah Pergub pembatasan sosial itu diterbitkan, hingga 29 April lalu, Gilbert mencatat 543 perusahaan yang melanggar dan 101 perusahaan disegel. Hal ini, menurut dia, menggambarkan kontrol pengawasan yang dilakukan dinas tenaga kerja DKI Jakarta perlu ditingkatkan demi tercapainya pelaksanaan pembatasan sosial yang diharapkan.

Selain itu, Gilbert menyarankan Dinas Tenaga Kerja untuk menyelidiki lebih dalam kepada perusahaan-perusahaan di DKI baik yang menerapkan Work from Home maupun tidak. "Apakah para karyawan mendapat paksaan untuk tetap bekerja ke kantor, perlu dilakukan investigasi apakah para karyawan mendapat ancaman untuk harus tetap bekerja dikantor," ungkapnya. (dni)